

ABSTRAK

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan yang salah satunya diperoleh dari sektor Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak merupakan salah satu faktor pemasukkan bagi Negara yang cukup potensial karena sebagian besar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, Khususnya penagihan pajak dengan surat paksa.

Tujuan Penulis melakukan penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Atas Prosedur Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bndung Bojonagara**” adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kriteria dalam penerbitan surat paksa, bagaimana prosedur penerbitan dan pelaksanaan surat paksa, kendala - kendala apa saja yang terdapat dalam prosedur penerbitan surat paksa, berapa tunggakan pajaknya, serta berapa penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan piutang pajaknya.

Metode yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah metode deskriptif analisis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi kerja praktik, wawancara dan penelitian kepustakaan.

Dari tugas akhir yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan dan pelaksanaan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara telah diatur dalam Undang Undang No. 19 tahun 2000. Apabila utang tidak dibayar dan telah dilakukan beberapa tindakan, maka KPP akan melakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kata Kunci : Surat Paksa

ABSTRACT

The income from tax sources includes various sectors of taxation, for instance: it was obtained from the Tax Billing sector with forced letter. Tax collection is considered one of the potential intakes for the country due to the fact that the majority of funding of the State Budget (APBN) is derived from the tax collection, particularly by forced letter.

*The author conducted research purposes, entitled “**Overview of Issuance and Implementation Procedure Forces Mail in Tax Office Pratama Bandung Bojonagara**” is to know what criteria of the issuance of forced letter, how the procedures for the issuance and execution of forced letter, constrains – constrains whatever contained in the forced issuance procedure, how many tax arrears, as well as how many tax collection and disbursement forced letter tax receivables.*

The method used in the process of this final report is descriptive analysis in Tax Office Pratama Bandung Bojonagara with data collecting techniques include practical work, interview and research literature.

From the final report has been done, it can be concluded that issuance and implementation force mail in Tax Office Pratama Bandung Bojonagara was regulated in Law Constitution of Indonesian Republic No. 19 of 2000. When the tax debt is not paid regularly and has done some action, KPP will do billing with a forces.

Keywords: Forces Mail